

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 201-2023.

Semarang,

**KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

SARWA PRAMANA, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19610211 198403 1003



RENCANA KERJA (RENJA) TA 2019

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAWA TENGAH**



024 3519927, 3519904



024 3519186



bpbd@jatengprov.go.id
bpbd_jateng@yahoo.com



Instagram/bpbdjateng



08813809409



www.bpbdjateng.info,
www.bpbd.jatengprov.go.id



@bpbdjateng



Facebook.com/BPBDJATENG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana kerja BPBD Prov Jawa Tengah disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD sesuai visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan target pada renstra, RKPD, RPJM Daerah dan prioritas program pembangunan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dilingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah yang telah menyusun dokumen rencana kerja tahun 2019 ini. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik BPBD Jawa Tengah pada tahun 2019, untuk menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan kebencanaan di Jawa Tengah sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Semarang,

Kalakhari BPBD Prov Jawa Tengah

SARWA PRAMANA, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP: 19610211 198403 1 003

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN..... 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

BAB I PENDAHULUAN 5

 A. Latar Belakang.....5

 B. Landasan Hukum 7

 C. Maksud dan Tujuan.....8

 D. Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU..... 10

 A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra 2013-2018 10

 B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 27

 1. Capaian Kinerja Pelayanan 27

 2. Identifikasi Lingkungan Stratejik 33

 3. Analisis Lingkungan Stratejik 37

 4. Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal..... 38

 C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 39

 1. Tantangan 40

 2. Peluang 43

 D. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 50

 E. Penelahaan Program dan Kegiatan Masyarakat 68

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 69

 A. Telaah Kebijakan Nasional 69

 B. Tujuan dan Sasaran Renja PD 72

 C. Program dan Kegiatan.....73

BAB IV PENUTUP 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Evaluasi Program Kegiatan Renstra 2013- 2017 11

Tabel 2 Telaah Evaluasi Capaian Renstra 25

Tabel 3 Evaluasi Capaian Sasaran Kinerja 2013 – 2016 28

Tabel 4 Capaian Sasaran Kinerja Renstra 2017 31

Tabel 5 Pemangku Kepentingan dan Ekspektasi..... 35

Tabel 6 Sasaran dan Arah Kebijakan..... 61

Tabel 7 Target BPBD Pada RPJMD 62

Tabel 8 Review Rancangan Awal SKPD 2018 63

Tabel 9 Kegiatan Usulan Masyarakat..... 68

Tabel 10 Tujuan Dan Sasaran Program BNPB 70

Tabel 11 Sasaran dan Target Sasaran Program dan Kegiatan 73

Tabel 12 Program dan Kegiatan BPBD Jawa Tengah TA 2018 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen-dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya dijadikan pedoman bagi arah pelaksanaan kegiatan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) yang berkurun waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) yang berkurun waktu 1 (satu) tahun. Renja OPD sangat terkait dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD. Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah maupun upaya bersama dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah, karena menjadi produk perencanaan pada unit satuan kerja pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan pada public yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja OPD merupakan rancangan usulan APBD pada BPBD Prov Jawa Tengah dengan target yang terukur serta telah disesuaikan berdasarkan prioritas dan strategi utama guna mendukung visi dan misi BPBD Prov Jawa Tengah. Pengajuan Renja ini telah disusun secara

realistis untuk mencapai tujuan pembangunan. Renja sebagai penjabaran tahunan dari renstra merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Prov Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah sekaligus wujud dan peran serta BPBD Prov Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Prov Jawa Tengah 2019 – 2023. Dokumen tersebut merupakan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.

a. Kedudukan BPBD Prov Jawa Tengah

Sekretariat BPBD Prov Jawa Tengah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dibidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur Pelaksana terdiri Kepala, Bagian (Bagian Tata Usaha) dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang Logistik dan Peralatan, sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional /ahli dan unsur pejabat pemerintah daerah.

b. Tugas Pokok

Sesuai ketentuan Pasal 2, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah.

c. Fungsi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, reabilitasasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.

- 5) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Landasan Hukum

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
5. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,
6. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana,
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
11. Peraturan Presiden No. 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Keadaan tertentu
12. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
14. Peraturan Daerah Jawa Tengah No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

15. Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah
16. Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029
17. Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
18. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BPBD Prov. Jawa Tengah
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 78 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Pedoman bagi BPBD Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD 2018-2023.
- b. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, dan evaluasi di lingkungan BPBD Prov Jawa Tengah

2. Tujuan

- a. Sebagai landasan operasional BPBD Prov. Jawa Tengah untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Sebagai pedoman untuk monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan PB.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan pembangunan

D. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III KONDISI LINGKUNGAN STRATEJIK

- A. Identifikasi Lingkungan Strategik
- B. Analisis Lingkungan Strategik
- C. Kesimpulan Analisa Faktor Internal dan Eksternal

BAB IV ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Fungsi OPD
- B. Tantangan dan Peluang
- C. Program Prioritas Menangani Kendala

BAB V RENCANA KERJA DAN TARGET KINERJA

- A. Sasaran dan Target Sasaran Kinerja
- B. Program dan Kegiatan

BAB VII PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra 2013-2018

Tahun anggaran 2017, BPBD Prov Jawa Tengah mengelola anggaran belanja program kegiatan sebesar Rp. 11.441.000.000, - (sebelas milyar empat ratus empat puluh satu juta rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembiayaan 7 (tujuh) program dan 60 (enam puluh) kegiatan. Secara fisik tercapai 100 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.630.807.522,- (92,92%). Dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 810.192.478,- (7,08%). Efisiensi anggaran belanja langsung kegiatan antara lain terdapat pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, honorarium narasumber/instruktur, belanja makan dan minum rapat, dan sewa ruang rapat/pertemuan. Mendasarkan capaian/realisasi keuangan program/kegiatan TA 2017, terdapat 10 (sepuluh) kegiatan dengan serapan kurang dari 90%, dan serapan terendah adalah kegiatan Kegiatan Penyusunan pedoman dan evaluasi darurat bencana Prov Jawa Tengah. Penyerapan anggaran pada kegiatan ini kurang optimal disebabkan karena porsi terbesar kegiatan ini adalah untuk pengadaan air bersih sebagai bentuk antisipasi bencana kekeringan. Untuk tahun 2017 ini, kebutuhan pengadaan air bersih sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang cepat sehingga langsung masuk ke musim penghujan disamping ketersediaan APBD Kab/Kota dan kepedulian dunia usaha dan masyarakat (kelompok Alumni sekolah/SMA, PT), sedangkan efisiensi belanja kegiatan yang kurang dari 100 % dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan
- b. Optimalisasi sumberdaya sehingga dapat mencapai target fisik dengan penghematan dukungan sumberdaya keuangan.

BPBD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan prioritas pada aspek pra bencana sebagaimana paradigma pengurangan risiko bencana, yaitu dengan menekankan pada upaya-upaya pada saat tidak terjadi bencana ataupun terdapat potensi terjadi bencana. Capaian indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rencana kerja program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Prov Jateng tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Evaluasi Program Kegiatan Renstra 2013- 2017

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisa si	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10 (=5+7+9)	11 (+10/4)
	NON URUSAN (EKS BAU)										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			780	432	156	156	100.00	144	732	93.85
05 01 01 000 1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat selama 1 tahun	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00
05 01 01 000 2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00
05 01 01 000 5	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan/premi asuransi barang milik daerah selama 1 Tahun	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00
05 01 01 000 6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas 1 tahun	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00
05 01 01 000 7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK selama 1 Tahun	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisa si	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
05 01 01 000 8	Keg Penyediaan Barang Cetak & penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 Tahun	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00
05 01 01 000 9	Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1 tahun	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00
05 01 01 001 1	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga selama 1 tahun	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00
05 01 01 001 2	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan selama 1 tahun	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00
05 01 01 001 4	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor selama 1 tahun	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00
05 01 01 001 5	Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	Terfasilitasinya rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisa si	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
05 01 01 001 6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	bulan	60	36	12	12	100.00	12	54	100.00
05 01 01 002 3	Kegi Penyediaan Logistik dan Sarana Pendukung Poliklinik	Tersedianya Jasa Jaminan/Premi Asuransi Kesehatan PNS selama 1 tahun	bulan	60	36	12	12	100.00		48	100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							51		30.28	45.32	
05 01 02 000 9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 Tahun	bulan	60	36	12	12	100	3.00	54	100.00
05 01 02 001 0	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	bulan	60	36	12	12			54	100.00
05 01 02 001 1	Keg.Pemeliharaaa n Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al	Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional kebencanaan scr Rutin/Berkala	bulan	60	36	12	12	100	3.00	54	100.00
05 01 02 001 5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1 tahun	bulan	60	36	12	12	100	3.00	54	100.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisa si	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
05 01 02 002 4	Kegiatan Peningkatan Sarana Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Sarana Kantor selama 1 tahun	paket	25	15	3	3	100	5.00	20	100.00
Program Penigkatan Disiplin Aparatur						65	65				
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya selama 1 tahun	stel	600	340	65	65	100	65.00	405	67.50
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						320	320		21.16	39.10	
05 01 04 000 1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggranya Diklat bagi paratur BPBD	orang	800	575	100	100	100	70.00	755	94.38
05 01 04 000 2	Keg Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangan	orang	800	1010	100	100	100	70.00	1,220	152.50
05 01 04 000 3	Keg Bimbingan Teknis Imple- mentasi Peraturan PerUU	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan UU	orang	700	450	100	100	100	80.00	620	100
05 01 04 000 4	Keg Peningkatan Kapasitas/Kualit as Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BPBD	diklat/ kursus	300	90	20	20	100	20.00	118	100
Program Pendidikan Non Formal dan Informal						-	-				

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisa si	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	Terselenggaranya Pendidikan kebencanaan bagi pelajar, aparatur dan masyarakat mll simulasi penanganan darurat bencana	orang	11,500	6325	2200	2200	100		8,525	74.13
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	Perencanaan										
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana						6	6		18.27	58.36	
04 01 09 000 1	Keg Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)	Tersusunnya Studi/kajian Kebencanaan (Disaster Study) di Jawa Tengah	dok studi	10	7	1	1	100	2.00	8	100.00
04 01 09 000 2	Kegiatan Perencanaan Bidang Kebencanaan	Tersusunnya Perencanaan Bid Kebencanaan di Jateng	dokumen	10	6	2	2	100	1.00	9	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Tematik Bidang Kebencanaan	Terselenggaranya Sosialisasi penyusunan dokumen bidang kebencanaan	kegiatan	5	3	1	1	100		4	80.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisasi	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
04 01 09 000 8	Kegiatan Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan	Terselenggaranya terkorodinasi keg kesiapan dan pencegahan bencana Jateng	kegiata n	6	3	1	1	100	1.00	5	100
04 01 09 000 9	Kegiatan Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan	Terselenggaranya Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan	kegiata n	6	2	1	2	200	1.00	5	100
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											
Perhubungan											
Program Pos, Telekomunikasi dan SAR						446	446		37.23	50.35	
02 09 04 000 2	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan	Terselenggaranya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan di Jateng	bulan	60	36	12	12	100	12.00	54	100.00
02 09 04 000 3	Kegiatan BinteK SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	Terselenggaranya BinteK SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	orang	1500	815	340	340	100	100.00	1,255	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisa si	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
02 09 04 000 4	Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR	Terselenggaranya Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR	orang	400	220	90	90	100	45.00	355	100
02 09 04 002 5	Keg SAR pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, se- dekah Laut/Sura	Terselenggaranya Operasi SAR Pada Event Tertentu dan Hari-hari Khusus di Jateng	kali	20	13	3	3	100	1.00	16	100.00
02 09 04 002 7	Keg Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana	Terselenggaranya koordinasi dan penanggulangan kerusakan infrstruktur	kali	10	6	2	2	100	2.00	9	100.00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
	Sosial										
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					624	487			0	
010605 0002	Keg Penyusunan Peta Resiko Bencana Prov Jateng	Tersedianya Peta Resiko Bencana Provinsi Jateng	kab/ko ta	35	17	6	6	100	6.00	23	100
01 06 05 000 3	Kegiatan Pengembangan Budaya Sadar Bencana	Terselenggaranya Pengembangan Budaya Sadar Bencana Jateng	kali	15	9	3	3	100	3.00	14	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisa si	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
01 06 05 000 6	Kegiatan Gladi Manajemen Bencana	Terselenggaranya Gladi Manajemen Bencana Jateng	kali	12	8	2	2	100	2.00	11	100
01 06 05 000 8	Keg Evaluasi, Pemantauan & Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat	Tersusunnya Evaluasi,Pemanta uan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat di Jateng	bulan	60	36	12	12	100	12.00	54	100
01 06 05 000 9	Kegiatan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana di Jateng	orang	600	380	150	170	113.33	35.00	550	100
01 06 05 001 2	Kegi Pedoman dan Kebijakan Penyelenggara Bencana	Terselenggaranya penyusunan Pedoman dan Kebijakan PB	dok	7	4	1	1	100	1.00	6	100
01 06 05 002 4	Keg Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah	Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana	kali	12	8	2	2	100	3.00	11	100
01 06 05 002 5	Keg Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng	Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Teknis PB di Jateng	kali	10	4	1	1	100	2.00	6	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisa si	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
01 06 05 002 9	Kegiatan Pembelajaran Wawasan Kebencanaan	Terselenggaranya Pembelajaran Wawasan Keben- canaan di Jateng	paket	6	3	1	1	100	2.00	4	100
01 06 05 003 0	Kegiatan Pengembangan Forum Pengu- rangan Risiko Bencana (PRB) Prov. Jateng	Terselenggaranya Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)Prov. Jateng	kali	15	8	1	1	100	2.00	9	100
01 06 05 003 1	Kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Terselenggaranya Sosialisasi Daerah Rawan Bencana di Jateng	orang	730	510	120	60	50	100.00	630	100
01 06 05 003 2	Kegiatan Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Terselenggaranya Fasilitasi/Mediasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Jateng	kali	12	7	2	2	100	1.00	10	100
01 06 05 003 6	Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Corporate Social Responsibility untuk Reduksi Bencana	Terselenggaranya Keg Koordinasi Pengembangan Corporate Social Responsibility untuk Reduksi Bencana Jateng	orang	400	120	80	160	200	40.00	320	100.00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisasi	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
01 06 05 003 7	Keg Penyusunan Rencana Kontijensi (Contingency Plan)	Tersedianya Rencana Kontijensi (Contingency Plan) Bencana di Jateng	keg	10	5	1	1	100	2.00	9	100.00
01 06 05 003 8	Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)	Teselenggaranya Keg Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Jateng	komunitas	10	4	2	2	100	1.00	7	100.00
01 06 05 004 3	Kegiatan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana	Terpasangnya Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana di Jateng	unit	600	270	90	120	133.33	150.00	480	100.00
01 06 05 004 8	Kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) Berbasis Masyarakat	kali	14	2	2	2	100	5.00	6	100
01 06 05 005 0	Keg Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana	Tersedianya Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana di Jawa Tengah	bulan	60	36	12	12	100	3.00	54	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisasi	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
01 06 05 005 1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Terfasilitasinya Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk Penanganan Darurat Bencana	orang	500	150	40	120	300	5.00	320	100
01 06 05 005 3	Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan PB antara Unsur Pengaruh BPBD Jateng dengan Para Pemangku Kepentingan PB	Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Unsur Pengaruh Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	bulan	60	36	12	12	100	12.00	54	100.00
01 06 05 005 4	Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana	Terlaksananya Pemantauan dan Koordinasi Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana	kegiatan	15	9	2	2	100	1.00	12	100.00
01 06 05 005 6	Keg Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana(<i>Damage and Losses Assesment</i>) dan JITU PB	Terselenggaranya Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment di Jawa Tengah	orang	330	160	40	40	100	80.00	200	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisasi	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
01 06 05 005 7	Kegiatan Koordinasi Penanganan bencana	Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan Pengurangan risiko bencana	kegiatan	8	5	2	2	100	2.00	7	100
01 06 05 005 8	Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	meningkatnya ketangguhan masyarakat daerah rawan bencana	desa	8		8	8	100	3.00	8	100
01 06 05 005 9	Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Logistik Bencana	terselenggaranya koordinasi dan konsolidasi logistik dan material bencana	kali	10	6	2	2	100	2	9	100
01 06 05 006 0	Kegiatan Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB	Terselenggaranya koordinasi daerah logistik dan peralatan bencana serta data / informasi peralatan PB di Jateng	kali	10	6	1	1	100	2	8	100
01 06 05 006 1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng	Terwujudnya kesiapsiagaan logistik dan peralatan dalam menghadapi bencana	kegiatan	15	9	2	3	150	1.00	13	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisasi	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
01 06 05 006 2	Keg Pemenuhan Kebutuhan Logistik masyarakat Terdampak Bencana	Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana di Jateng	paket	5000 0		5	5	100	2.00	5	100
01 06 05 006 3	Kegiatan Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jateng	Terselenggaranya Koordinasi dan sinkronisasi sektor terdampak bencana	kali	10	1	1	6	600	1.00	8	100
01 06 05 006 4	Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Berapi	Terselenggaranya upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana kawasan gunung berapi	kali	12		3	2	66.66	2.00	3	100
	Komunikasi dan Informatika										
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa										
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					12	12		3	6	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2013 s/d 2018		Realisasi Target Kinerja Renstra s.d Renja 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Th 2018	
						Target	Realisa si	% Realisas		Realisasi Kinerja	Tk Capaian Kinerja
02 10 01 002 3	Kegiatan Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah	Terselenggaranya Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah	bulan	60	36	12	12	100.00	12.00	54	100

Tabel 2
Telaah Evaluasi Capaian Renstra

No	Program/ Kegiatan	Keterangan
1	2	3
I	Program administrasi Perkantoran	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memenuhi/sesuai target
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memenuhi/sesuai target
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	Memenuhi/sesuai target
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	Memenuhi/sesuai target
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memenuhi/sesuai target
6	Keg Penyediaan Barang Cetak & penggandaan	Memenuhi/sesuai target
7	Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Memenuhi/sesuai target
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Memenuhi/sesuai target
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Memenuhi/sesuai target
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Memenuhi/sesuai target
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	Memenuhi/sesuai target
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Memenuhi/sesuai target
13	Kegi Penyediaan Logistik dan Sarana Pendukung Poliklinik	Tidak Memenuhi/tidak sesuai target
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tidak Memenuhi/tidak sesuai target
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tidak Memenuhi/tidak sesuai target
3	Keg.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Memenuhi/sesuai target
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Memenuhi/sesuai target
5	KegiatanPeningkatan Sarana Aparatur	Memenuhi/sesuai target
III	Progr Program Peningkatan Disiplin Aparatur am administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tidak Memenuhi/tidak sesuai target
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Memenuhi/sesuai target
2	Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Memenuhi/sesuai target
3	Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Memenuhi/sesuai target
4	Keg Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	Memenuhi/sesuai target
V	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	
1	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	Tidak Memenuhi/tidak sesuai target. Sesuai sasaran dan orientase program
VI	PERENCANAAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	

No	Program/ Kegiatan	Keterangan
1	Keg Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)	Memenuhi/sesuai target
2	Kegiatan Perencanaan Bidang Kebencanaan	Memenuhi/sesuai target
3	Kegiatan Penyusunan Dokumen Tematik Bidang Kebencanaan	Tidak Memenuhi/tidak sesuai target, regrouping target dengan kegiatan sejenis
4	Kegiatan Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan	Memenuhi/sesuai target
5	Kegiatan Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan	Memenuhi/sesuai target
URUSAN PERHUBUNGAN		
VII Program Pos, Telekomunikasi dan SAR		
1	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan	Memenuhi/sesuai target
2	Kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	Memenuhi/sesuai target
3	Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR	Memenuhi/sesuai target
4	Keg SAR pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, se-dekah Laut/Sura	Memenuhi/sesuai target
5	Keg Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana	Memenuhi/sesuai target
URUSAN SOSIAL		
VII I Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
1	Keg Penyusunan Peta Resiko Bencana Prov Jateng	Memenuhi/sesuai target
2	Kegiatan Pengembangan Budaya Sadar Bencana	Memenuhi/sesuai target
3	Kegiatan Gladi Manajemen Bencana	Memenuhi/sesuai target
4	Keg Evaluasi, Pemantauan & Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat	Memenuhi/sesuai target
5	Kegiatan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana	Memenuhi/sesuai target
6	Kegi Pedoman dan Kebijakan Penyelenggara Bencana	Memenuhi/sesuai target
7	Keg Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah	Memenuhi/sesuai target
8	Keg Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng	Memenuhi/sesuai target
9	Kegiatan Pembelajaran Wawasan Kebencanaan	Memenuhi/sesuai target
10	Kegiatan Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Prov. Jateng	Memenuhi/sesuai target
11	Kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Memenuhi/sesuai target
11 2	Kegiatan Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Memenuhi/sesuai target
13	Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Corporate Social Responsibility untuk Reduksi Bencana	Memenuhi/sesuai target
14	Keg Penyusunan Rencana Kontijensi (Contingency Plan)	Memenuhi/sesuai target
15	Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)	Memenuhi/sesuai target
16	Kegiatan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana	Memenuhi/sesuai target

No	Program/ Kegiatan	Keterangan
17	Kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) Berbasis Masyarakat	Memenuhi/sesuai target
18	Keg Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana	Memenuhi/sesuai target
19	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Memenuhi/sesuai target
20	Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan PB antara Unsur Pengarah BPBD Jateng dengan Para Pemangku Kepentingan PB	Memenuhi/sesuai target
21	Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana	Memenuhi/sesuai target
22	Keg Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana(<i>Damage and Losses Assesment</i>) dan JITU PB	Memenuhi/sesuai target
23	Kegiatan Koordinasi Penanganan bencana	Memenuhi/sesuai target
24	Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	Memenuhi/sesuai target
25	Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Logistik Bencana	Memenuhi/sesuai target
26	Kegiatan Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB	Memenuhi/sesuai target
27	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng	Memenuhi/sesuai target
28	Keg Pemenuhan Kebutuhan Logistik masyarakat Terdampak Bencana	Memenuhi/sesuai target
29	Kegiatan Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jateng	Memenuhi/sesuai target
30	Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Berapi	Memenuhi/sesuai target
IX	Program administrasi Perkantoran	
1	Kegiatan Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah	Memenuhi/sesuai target

B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

1. Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian indicator kinerja BPBD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis telah sesuai dengan target. Pencapaian tersebut diperoleh atas usaha dan kerjasama para pemangku kepentingan. Hasil capaian kinerja yang dilakukan dengan berpedoman pada dokumen rencana strategis disajikan pada table berikut.

Tabel 3
Evaluasi Capaian Sasaran Kinerja 2013 – 2016

SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET RENCANA OPD				Realisasi			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
(1) Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai									
(1.1) Tersusunnya Peraturan/Pedoman bidang PB	(1.1.1) jumlah Peraturan/pedoman dalam PB di Jawa Tengah	0	0	1	1	1	2	1	0
	(1.1.2) Jumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi BPBD Kab/Kota di Jateng	28	1	1	1	3 (28)	3 (31)	2 (33)	- (33)
(1.2) Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah	(1.2.1) Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana	0	0	1	0	1	4	2	1
	(1.2.2) Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintas wilayah	0	0	0	1	0	1	1	1
	(1.2.3) Tersusunnya system manajemen logistik PB	0	0	0	1	0	0	0	1
	(1.2.4) Tersusunnya system manajemen peralatan PB	0	0	0	1	0	0	0	1
(2) Meningkatkan kapasitas sumber daya dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana									
(2.1) Terpenuhiya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana	(2.1.1) Jumlah kursus dan diklat teknis, PB, manajerial dan pendukung PB yang dilaksanakan/ diikuti	10	10	10	10		26		15
	(2.1.2) Jumlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB	500	500	500	500				
(2.2) Terpenuhiya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	(2.2.1) jumlah tambahan sarana dan prasarana transportasi/ evakuasi	5	5	5	5	5	5	5	5
	(2.2.2) tersedia gedung/ gudang penyimpanan logistik dan peralatan pb	0	0	1	0	0	0	1	0
	(2.2.3) jml paket logistik pengungsian	0	800	1000	1200	500	1000	1500	1000

SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET RENCANA OPD				Realisasi			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
	(2.2.4) Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana	35	35	35	35	35	35	35	35
	(2.2.5) Penguatan & Sinergi Kelembagaan PB Jateng	0	5	5	5	0	5	5	5
(3) Meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana									
(3.1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya	(3.1.1) Jumlah masyarakat /relawan terlatih PB	0	5.000	5.000	5.000	2.000	4.500	4.500	4.500
	(3.1.2) Jumlah masyarakat/relawan mempunyai sertifikasi / keterangan pelatihan	0	0	100	150	100	100	100	150
(4) Meningkatkan kemampuan masyarakat dlm PB									
(4.1) terwujudnya kemandirian masy dalm peny PB	(4.1.1) Jumlah desa siaga bencana	2	2	2	3	2	2	2	0
	(4.1.2) Jumlah desa tangguh bencana	0	0	4	4	0	0	8	8
(5) Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana									
(5.1) Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana	(5.1.1) jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian /perguruan tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2
	(5.1.2) jumlah komunitas peduli bencana,	0	10	13	15	2			
	(5.1.3) jmlh dunia usaha terlibat PB melalui CSR	0	3	10	15				
	(5.1.4) Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah	0	3	3	3	3	3	3	3
	(5.1.5) Jumlah media public-kasi data dan informasi PB	3	3	3	3	3	3	3	3

SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET RENCANA OPD				Realisasi			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
(6) Memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan tepat guna dalam penyelenggaraan PB									
(6.1) Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini	(6.1.1) Tersedia data dan informasi bencana	1	1	1	1	1	1	1	1
	(6.1.2) Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng,	1	1	1	1	1	1	1	1
(6.2)Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dg memperhatikan kearifan lokal	(6.2.1) System early warning masyarakat	0	1	2	2	0	0	2	2
	(6.2.2) Jumlah publikasi di media	100	100	100	100	150	150	150	150
(7) Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan dengan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan									
(7.1)Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah	(7.1.1) Tersusunnya Rencana PB Jawa Tengah	0	0	1	0	0	1	1	0
	(7.1.2) Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng	5	5	6	6	5	5	6	6

Tabel 4
Capaian Sasaran Kinerja Renstra 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				Realiasi Capaian		Proyeksi		Catatan	
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019		%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana	8	8	8	8	8	8	8	8	Sesuai	100
		Jumlah unit EWS terpasang	2	2	2	2	2	5	2	2	Sesuai	-
		Jumlah kegiatan gladi/simulasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana	3	3	3	3	3	3	3	3	Sesuai	-
		Jumlah rambu Jalur Evakuasi terpasang	90	90	90	90	90	90	90	90	Sesuai	-
		Jumlah kab /kota yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen bidang kebencanaan	8	8	8	8	8	8	8	8	Sesuai	-
		Jumlah peserta/ komunitas PB yang terlibat dalam upaya PRB	150	150	150	150	150	150	150	150	Sesuai	-
2	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Jumlah peserta bintek SAR dan latihan gabungan	250	250	250	250	250	100	250	250	Sesuai	-
		Jumlah peserta pelatihan TRC	150	150	150	150	150	75	150	150	Sesuai	-
		Jumlah tangki bantuan air bersih	1000	1000	1000	1000	1000	517	1000	1000	Tidak Sesuai	-
3	Meningkatnya	Jumlah peserta	60	60	60	60	60	60	60	60	Sesuai	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				Realiasi Capaian		Proyeksi		Catatan	
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019		%
	kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	pelatihan DALa/ Jitu Pasna										
		Jumlah koordinasi dan konsolidasi rehab rekon	13	13	13	13	13	13	13	13	Sesuai	-
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Jumlah paket logistik untuk masyarakat terdampak bencana	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	Sesuai	-
		Jumlah unit peralatan sarana prasarana PB	5	5	5	5	5	5	5	5	Sesuai	-
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan, kinerja, dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah publikasi kebencanaan dan even pengurangan risiko bencana/ pembangunan	153	153	153	153	153	160	153	153	Sesuai	-
		Jumlah data kejadian kerusakan/ kerugian bencana	1	1	1	1	1	1	1	1	Sesuai	-
		Jumlah peserta kursus/diklat teknis dan pendukung PB	300	300	300	300	300	265	300	300	Sesuai	-
		Jumlah kegiatan koordinasi konsolidasi lintas sekor wilayah para pemangku kepentingan PB	8	8	8	8	8	8	8	8	Sesuai	-

2. Identifikasi Lingkungan Strategik

a. Identifikasi Pelanggan, stakeholder, dan Ekspetasinya

Mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi BPBD Prov Jawa Tengah, para pemangku kepentingan penanggulangan bencana yang menjadi mitra kerja BPBD Prov Jawa Tengah antara lain adalah:

1) Kementerian /Lembaga

Kementerian /Lembaga yang berkaitan langsung dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah:

a) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

BNPB merupakan instansi ditingkat pusat yang dibentuk atas dasar UU No. 24 Tahun 2007 serta peraturan pemerintah. BNPB merupakan lembaga teknis yang berperan dan berfungsi sebagai Pembina urusan teknis bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional, sehingga BNPB bukan sebagai instansi vertical, namun peran dan support dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi sangat penting dan strategis bagi Jawa Tengah.

b) Kementerian Dalam Negeri

Melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan, Kemendagri, BPBD merupakan binaan administrasi pemerintahan bidang PB. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dikelola dalam direktur pencegahan dan penanggulangan bencana. Pembinaan secara administrasi operasional telah dan terus dilakukan Ditjen BAK ini untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik.

c) Kementerian /Lembaga Lain

Kebencanaan merupakan isu bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu bidang urusan pemerintahan. Permasalahan kebencanaan bersifat lintas sector/urusan dan mencakup beberapa bidang pemerintahan, sehingga perlu kerjasama lintas sector/bidang maupun lintas wilayah. Beberapa kementerian/lembaga yang terkait antara lain adalah Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum, BMKG, BIG, Lapan, BPS, BPN, TNI, POLRI, Basarnas, para pemangku kepentingan PB lainnya

2) OPD teknis Pemerintah Prov Jawa Tengah

BPBD Prov Jawa Tengah dibentuk dan hadir sebagai wujud komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik, terstruktur, terencana dan terpadu,

kehadiran BPBD Prov Jawa Tengah tidak mengambil alih peran dari OPD teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kebencanaan. Sebagai contoh adalah dampak bencana dapat merusak sector transportasi khususnya jalan dan jembatan, dengan demikian OPD teknis yaitu Dinas Bina Marga yang harus memperbaiki sektor jalan yang rusak tersebut, BPBD Provinsi Jateng bersama dinas binamarga melakukan perhitungan kerusakan dan kerusakan serta estimasi kebutuhan untuk rehabilitasi maupun rekonstruksi sector terdampak.

3) Pemerintah Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten/Kota mempunyai tanggungjawab besar dalam rangka sinergi dan mensinkronisasikan program dan kegiatan pembangunan dimasing-masing daerah dengan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga proses dan hasil pembangunan tidak berdampak pada meningkatnya risiko bencana di daerah tersebut maupun didaerah lain disekitarnya.

4) Dunia Usaha

Sesuai dengan amanat undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Peran dunia usaha dengan tanggungjawab social yang diwujudkan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk kepedulian dan komitmen bersama untuk ikut serta dalam penyelenggaraan PB secara komprehensif.

5) Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek bukan hanya objek terdampak bencana. Dengan kondisi alam Jawa Tengah yang mempunyai kerawanan dan tingkat risiko tinggi, sementara kondisi masyarakat Jawa Tengah yang cukup besar, hal ini menyebabkan masyarakat jawa tengah harus tinggal dan hidup berdampingan dengan bencana. Oleh sebab itu pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bencana perlu ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh bencana.

Tabel 5
Pemangku Kepentingan dan Ekspektasi

Pemangku Kepentingan	Ekspektasi
A. Pelanggan Internal	
1. Gubernur 2. Pejabat BPBD 3. Tenaga staf	1. Sarana kerja yang memadai 2. Peluang dan peningkatan karir terbuka 3. Peningkatan kesejahteraan 4. Dukungan operasional kegiatan 5. Peningkatan kesejahteraan 6. Kejelasan pembagian tugas 7. Peningkatan kesejahteraan 8. Peluang karir 9. Respon cepat, tepat akurat
B. Pelanggan Eksternal	
1. BNPB 2. Kemendagri 3. Kementerian/Lem baga 4. OPD teknis terkait kebencanaan	1. Kinerja tinggi 2. layanan kebencanaan cepat, tanggap 3. Program tepat sasaran 4. Koordinasi 5. Dukungan sarana dan prasarana ideal
C. Pemangku Kepentingan lainnya	
1. Masyarakat 2. Akademisi / Peneliti 3. Dunia usaha	1. Tercukupinya data dan informasi kebencanaan 2. Terpenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana 3. System PB berjalan dengan baik 4. Kerjasama bidang iptek 5. Dukungan dana, sarana penelitian kehutanan 6. Pemanfaatan hasil penelitian kebencanaan 7. Daerah rawan bencana 8. Iklim usaha kondusif

b. Identifikasi Faktor-Faktor Lingkungan Strategik

- 1) Penataan kelembagaan BPBD seiring dengan terbitnya UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah beserta perubahannya
- 2) Penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur pada PP No 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
- 3) Penanggulangan kebencanaan merupakan urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur
- 4) Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha (Platform Nasional)

- 5) Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana
- 6) Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi
- 7) Membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana
- 8) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai, sehingga memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi
- 9) Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP)
- 10) Terdapatnya teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan inventarisasi /pendataan secara lebih efektif dan efisien
- 11) Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak
- 12) Pembinaan kewilayahan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memungkinkan untuk saling berkoordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah
- 13) Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui kementerian /lembaga teknis, pemanfaatan sumberdaya milik sektor swasta
- 14) Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional
- 15) Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana sebesar sekian persen (1 %) dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat
- 16) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, kursus, dll
- 17) Penyusunan aplikasi, system informasi untuk menyimpan, dan mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas PB secara baik

- 18) Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodic
- 19) Perlunya pengarusutamaan paradigm pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana
- 20) Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP, indikator kinerja dalam pengelolaan penanggulangan

3. Analisis Lingkungan Stratejik

a. Analisis Lingkungan Internal

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2008, BPBD Prov Jawa Tengah pada prinsipnya masih memerlukan peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut berperan sebagai indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Prov Jawa Tengah maupun sumberdaya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Provinsi Jawa Tengah harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Prov Jawa Tengah jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Jawa Tengah yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan system untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang selama ini telah dilaksanakan pada umumnya belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini perlu segera ditangani agar dapat menjadi pembelajaran bersama dan dapat saling berbagi pengalaman penanggulangan bencana. Dengan demikian perlu dukungan pedoman dan mekanisme *knowldegde sharing*.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masih belum merata dan belum ideal. Sarana dan prasarana pendukung tidak hanya yang dimiliki oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah, namun juga oleh pemerintah kabupaten/kota swasta maupun perorangan. Sumberdaya tersebut dapat dioptimalkan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam konteks tanggungjawab bencana, terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam penanggulangan bencana, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dunia usaha selama ini melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) lebih sering dimanfaatkan untuk penanganan saat darurat bencana. Sementara itu, paradigma penanggulangan bencana sekarang ini telah bergeser dari darurat kepada pengurangan risiko bencana. Dengan demikian perlu didorong agar dunia usaha dapat berperan dalam penanggulangan bencana sejak pra bencana. Hal ini juga menjadi nilai strategis bagi dunia usaha untuk dapat lebih dekat dengan masyarakat dan mempunyai nilai investasi.

Sebagian masyarakat Jawa Tengah dikarenakan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, menempati daerah rawan bencana dan hidup berdampingan dengan bencana. Kesadaran terhadap bencana yang ada disekitarnya perlu ditumbuhkan agar mereka tidak menjadi korban bencana.

4. Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

a. Kesimpulan Analisis Faktor Internal

- 1) Peningkatan kapasitas aparatur PB baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus ditingkatkan
- 2) Dukungan para pemangku kepentingan agar dilibatkan pada sector pemerintah terutama eksekutif dan legislative agar terus terpadu untuk mendukung program dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam bentuk dukungan anggaran dan pemenuhan saran dan sarana pendukung
- 3) Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jateng masih perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.
- 4) Sarana dan prasarana pendukung tidak hanya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun juga oleh pemerintah kabupaten/kota swasta maupun perorangan.
- 5) Perlu dukungan dalam bentuk pencatatan substansi penanggulangan bencana yang telah dilakukan sehingga terdokumentasi dengan baik

b. Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal

- 1) Sumberdaya PB milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tersedia cukup banyak namun perlu diatur dalam kesepakatan

maupun peraturan agar pemanfaatannya dalam penanggulangan bencana menjadi lebih baik

- 2) Dunia usaha selama ini lebih banyak membantu dalam penanggulangan bencana khususnya saat tanggap darurat sehingga perlu didorong upaya untuk mengikutsertakan dunia usaha sejak upaya pra bencana melalui pendidikan maupun pembangunan dibidang peningkatan kapasitas masyarakat
- 3) Masyarakat agar terliantat secara aktif dalam penanggulangan bencana, mereka tidak hanya sebagai objek namun juga subjek dalam PB. Partisipasi masyarakat akan berdampak pada makin kuatnya percepatan ketangguhan menghadapi bencana.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2008, BPBD Prov Jawa Tengah pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Prov Jawa Tengah maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Prov. Jawa Tengah harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik pra, tanggap darurat maupun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana.

2. Belum seluruh Kabupaten/Kota membentuk BPBD berdasarkan Perda, mengakibatkan kesulitan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Jawa Tengah,
4. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan pemerintah pusat untuk tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan
5. Masih terbatasnya sarana prasarana PB seperti peralatan penanggulangan bencana, logistik, material kebencanaan yang lainnya
6. Banyaknya desa yang termasuk daerah rawan bencana sedangkan fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana di Jateng sangat terbatas
7. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang PB di Jateng
8. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat, Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial, Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah
9. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah
10. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Prov Jawa Tengah jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Jawa Tengah yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan system untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

1. Tantangan

Penanggulangan bencana merupakan isu bersama sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Paradigm pengurangan risiko bencana yang menekankan pada kegiatan penanggulangan bencana dilakukan sejak dini, sejak tidak ada bencana, sangat menentukan dan dapat dilihat

tingkat keberhasilannya ketika terjadi bencana. Indikator sederhananya adalah dampak negatifnya menjadi sangat kecil baik kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korba jiwa manusia.

Tingginya ancaman bencana di Jawa Tengah perlu disikapi dengan meningkatkan kesiapsiagaan aparaturnya yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana PB pada semua jenis bencana dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan PB.

Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana Jawa Tengah oleh BPBD Prov Jawa Tengah diharapkan mampu Pusat data dan Informasi bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan komunikasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya.

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Jawa Tengah, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program-program kegiatan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Prov Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Jawa Tengah adalah:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Jawa Tengah
- b. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan, seperti aktivitas pemanfaatan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi, Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun menyebabkan semakin terbatasnya sumber

- air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas asir permukaan dan sedimentasi
- c. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah
 - d. Belum semua regulasi mengacu pada Peraturan Daerah Jawa Tengah No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Penanggulangan bencana
 - e. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana
 - f. Kewenangan pemerintah provinsi pada era otonomi daerah pada dasarnya tidak dapat mengintervensi pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana alasan kemanusiaan intervensi masih dapat dilakukan
 - g. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana,
 - h. Sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas. Distribusi kompetensi pegawai yang ada masih belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan.
 - i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak
 - j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
 - k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah,

- l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan
- m. Partisipasi dunia usaha melalui alokasi anggaran CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.
- n. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air

2. Peluang

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur. Sesuai dengan UU dan Perda Jateng, maka BPBD Prov Jawa Tengah mempunyai 3 (tiga) fungsi utama PB yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Prov Jawa Tengah memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PSDA dan Tata ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman dan dinas lain yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD mengkoordinasikan program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai *incident commander*, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian,

perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting.

Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi akan dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (Lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

a. Legislasi,

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB.

Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. Upaya yang dilakukan pada prioritas di Jawa Tengah adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

b. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi

2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :

a) rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran

b) Rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan

c) rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran

c. Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal, seperti Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB, Forum PRB Provinsi atau Forum PRB Kabupaten/Kota, Forum Merapi, Forum Slamet.

d. Pengembangan kapasitas

Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pasca 2015 telah diadopsi pada saat penyelenggaraan Konferensi Dunia ke-3 untuk Pengurangan Risiko Bencana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 -18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang. Selama Konferensi, seluruh negara peserta juga menegaskan komitmen mereka untuk pengurangan risiko bencana dan pembangunan ketahanan bencana yang harus ditangani secara serius dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dan, jika perlu, untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan, program kerja, dan anggaran di semua tingkat dan dipertimbangkan dalam kerangka yang relevan. Kesepakatan dan hasil konferensi tersebut merupakan Kerangka aksi yang dikenal dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) merupakan kesepakatan internasional dalam rangka pengurangan risiko bencana tahun 2015-2030 sebagai lanjutan dari Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*). Hasil yang diharapkan sampai dengan 15 tahun dari SFDRR adalah Pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana

1) Tujuan

- a) Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko
- b) Mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan
- c) Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan

2) Target:

- a) Mengurangi kematian rata-rata per 100.000
- b) Mengurangi orang terdampak rata-rata per 100.000
- c) Mengurangi kerugian ekonomi / GDP
- d) Mengurangi kerusakan infrastruktur kunci
- e) Meningkatkan jumlah Negara dengan strategi dan rencana PRB
- f) Meningkatkan kerjasama internasional
- g) Meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS

3) Tindakan prioritas

- a) Memahami risiko bencana

Kebijakan dan praktek harus didasarkan pada pemahaman kerentanan, kapasitas, aparan, karakteristik bahaya dan lingkungan

- (1) Mendorong pengumpulan, manajemen dan akses ke informasi risiko
- (2) Gunakan dasar, data berbasis lokasi
- (3) Statistik kerusakan & kerugian
- (4) Mengoptimalkan IPTEK
- (5) Meningkatkan kesadaran
- (6) Gunakan informasi risiko untuk kebijakan pembangunan & PRB

b) Penguatan tata kelola risiko

Tata kelola yang diperlukan untuk mendorong kerjasama kemitraan mekanisme, lembaga, untuk pelaksanaan PRB dan Sumberdaya

- (1) Mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor
- (2) Mengadopsi strategi, rencana, peran tugas
- (3) Menetapkan insentif bagi kepatuhan, pemantauan dan pelaporan
- (4) Memberdayakan daerah
- (5) Mempromosikan kebijakan, standar, kemitraan

c) Investasi PRB untuk Resiliensi

Investasi publik dan swasta dalam tindakan struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja

- (1) Mengalokasikan sumber daya untuk semua tingkatan dan sektor
- (2) Meningkatkan infrastruktur kritis
- (3) Mempromosikan tindakan-tindakan non-struktural, misalnya standar, kesehatan, jaring pengaman sosial, pengungsian
- (4) Mengintegrasikan PRB dalam instrumen fiskal dan keuangan dan menggali *risk sharing* dan *Transfer*
- (5) Meningkatkan ketahanan bisnis
- (6) Melindungi mata pencaharian, pariwisata, dll

d) Meningkatkan manajemen risiko

Memperkuat kesiapsiagaan, respon dan pemulihan di semua tingkatan sebagai kesempatan penting untuk PRB dan integrasinya ke dalam pembangunan

- (1) Kesiapan dan kebijakan, rencana, program
- (2) *People-centred multi-hazard*, ramalan & EWS
- (3) Mempromosikan ketahanan masyarakat, layanan infrastruktur
- (4) Bantuan & pemulihan pendanaan, koordinasi, prosedur
- (5) Mengembangkan hukum, panduan, prosedur, mekanisme

Meskipun HFA sudah digantikan dengan SFDRR namun agenda HFA yang masih belum optimal masih terus ditingkatkan dan capaian dan target HFA tetap dilanjutkan dengan beberapa penekanan yang menjadi focus utama

e. Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1) Pendanaan dari pemerintah.

- a. Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) termasuk Dana Alokasi Khusus,
- b. Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontinjensi
- c. Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL;
Digunakan untuk bantuan kemanusiaan untuk penanganan dan siaga darurat bencana.
- d. Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (*build back better and safer*)

2) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional.

Mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang-peluang yang ada, maka isu-isu prioritas antara lain adalah:

1. Masih terdapat 2 (dua) Kota yang belum membentuk BPBD berdasarkan Perda, mengakibatkan kesulitan koordinasi program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Jawa Tengah,
3. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota
4. Kapasitas gedung untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana belum optimal
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah

7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
8. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Jawa Tengah dibandingkan dengan banyaknya desa yang rawan dan risiko bencana
9. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah
11. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
12. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Jawa Tengah antara lain:

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Penyusunan Peta Resiko Bencana Provinsi Jawa Tengah
- b. Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana
- c. Kegiatan Gladi Manajemen Bencana
- d. Kegiatan Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah
- e. Kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
- f. Kegiatan Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- g. Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung api
- h. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Reduksi Bencana
- i. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)
- j. Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
- k. Kegiatan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana
- l. Kegiatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) berbasis Masyarakat

2. Penanganan Darurat

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
- b. Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR
Melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana
- c. Kegiatan SAR Pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah laut/Sura
antisipasi dan partisipasi BPBD Jawa Tengah dalam berbagai event kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kebudayaan maupun keagamaan terutama pada event lebaran dan sura /sedekah laut dan terlibat dalam posko gabungan natal dan tahun baru
- d. Kegiatan Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat
Kesiapan pemerintah menghadapi ancaman bencana di Jateng serta pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat terdampak bencana (kekeringan)
- e. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana (Posko).
Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/7 hari dengan selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana
- f. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat Bencana

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana
- b. Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana
- c. Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng
- d. Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

- e. Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi PascaBencana
- f. Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian (Damage and Losses Assesment) dan JITU PB
- g. Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jawa Tengah

4. Logistik dan Peralatan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana, Peralatan dan Logistik Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana, dilakukan pada saat tidak ada bencana dan bahan logistik dan peralatan difungsikan sebagai antisipasi dan *buffer stock* logistik kebencanaan. Stok logistik tersebut didorong di Kabupaten/Kota dan Bakorwil untuk mempermudah mobilisasi dan dropping logistik ke lokasi bencana.
- b. Kegiatan Koordinasi, dan Konsolidasi Logistik Bencana, dilaksanakan sebagai bentuk saling koordinasi antar kabupaten/kota
- c. Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB dilaksanakan untuk memantau dan memberikan pendampingan agar pengelolaan logistik dan peralatan bencana sesuai dengan standar dan memenuhi kriteria yang aman penyimpanan
- d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng Merupakan sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam kebencanaan

D. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, namun hingga tersusunnya dokumen RKPD ini, RPJMD 2018-2023 belum ditetapkan, sehingga penyusunan dokumen RKPD 2019 berpedoman pada RPJPD Jawa Tengah Tahun 2005-2025, memperhatikan kesinambungan dengan dokumen RPJMD 2013-2018, serta mengacu pada RPJMN Tahun 2015 – 2019 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 Tahap III (2014 – 2019). Visi pembangunan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yaitu “Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”.

Pembangunan daerah Tahun 2019 merupakan tahun terakhir Tahap III RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi

rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas dan pengelolaan sumber daya alam

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang tahun 2015-2019. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 ditujukan untuk **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 tersebut, ditetapkan **prioritas pembangunan daerah tahun 2019**, meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah
3. Kualitas hidup dan daya saing SDM
4. Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup
5. Ketahanan pangan dan energi
6. Kesenjangan wilayah
7. Tata kelola pemerintahan

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam **fokus pembangunan**, yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan, difokuskan pada:
 - a. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan melalui penanganan perumahan dan penyehatan lingkungan permukiman (RTLH, sanitasi, air bersih, listrik); penanganan kawasan permukiman kumuh; peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pangan;pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi PMKS;dan kepemilikan administrasi kependudukan.
 - b. Penguatan*sustainable livelihood* melalui keberantaraan akses terhadap asset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan *start up* wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan.
 - c. Penguatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta gotong royong pelibatan seluruh komponen potensi (swasta dan pihak lainnya) dalam kesetiakawanan sosial.
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah,difokuskan pada:
 - a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian; asuransi petani; peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi;

- pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; revitalisasi peran balai pertanian.
- b. Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing melalui peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; serta didukung dengan pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).
 - c. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan; peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, kapal, TPI); perbaikan kualitas benih dan pakan ikan mandiri; peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolahan ikan untuk ekspor.
 - d. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan rakyat); peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil, mikro, dan menengah melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk; hilirisasi industri; mengembangkan inovasi teknologi produksi; keberantaraan akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan kawasan industri; keberantaraan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri besar; fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM; serta peningkatan infrastruktur jaringan produksi, distribusi, promosi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia.
 - f. Pengembangan inovasi teknologi dengan pengembangan *Technopark* serta peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat.
 - g. Peningkatan pariwisata berbasis masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; peningkatan promosi wisata; kerjasama dengan pelaku wisata; aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; serta peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
 - h. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, tepat; kebijakan investasi sejalan dengan prioritas daerah untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya saing wilayah;

pengembangan *digital investment promotion*; pengembangan investasi berbasis produk-produk unggulan kabupaten/kota; serta mendorong perwujudan investasi hijau.

3. Kualitas hidup dan daya saing Sumberdaya Manusia (SDM), difokuskan pada:
 - a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan melalui sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus; pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude*; pengembangan *learning culture*; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi sesuai kewenangan provinsi.
 - b. Peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan; pengembangan SIM RS Rujukan *Online*; peningkatan kualitas dan pemerataancakupan tenaga kesehatan; serta peningkatan capaian wilayah *Open Defecation Free* (tidak buang air besar sembarangan).
 - c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan program pendidikan *link and match* berbasis *demand-driven*; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasiberstandar nasional dan/atau internasional); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung *demand* tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.
 - d. Pemanfaatan Bonus Demografi melalui peningkatan kualitas penduduk usia produktif (15-64 Tahun) yang didukung peran lintas sektor/program antara lain: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan investasi;
 - e. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga melalui peningkatan keterlibatan perempuan

- dalam proses politik dan jabatan publik; peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak anak; serta peningkatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia
- f. Peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui penguatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - g. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.
 - h. Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan melalui peningkatan dan pengembangan generasi muda mandiri dan berdikari, pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
 - i. Pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan serta kelembagaan olahraga melalui penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP), penyelenggaraan kuantitas dan kualitas kompetisi olahraga berkelanjutan, pengembangan olahraga unggulan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pembudayaan/pemassalan olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga.
 - j. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui pengembangan seni budaya, pelestarian cagar budaya, dan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; perkuatan Lembaga Masyarakat Di sekitar Hutan (LMDH); pengelolaan sumber daya air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan, pengendalian perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.

- b. Penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, memperkuat kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, penanganan tematik daerah rawan bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada:
- a. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian; penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu dan keamanan pangan; Pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.
 - b. Pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; pengembangan listrik murah dan hemat; pengembangan energi baru terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya; serta budaya hemat energi.
6. Kesenjangan wilayah, dengan fokus pada:
- a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan mendukung pengembangan kawasan strategis dan pemerataan antara wilayah,serta menghubungkan pantura – pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
 - b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
 - c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan

fungsi perkotaan yang semula Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp).

7. Tata kelola Pemerintahan, difokuskan pada:
- a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
 - b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
 - c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya *clean and clear government* dan menerapkan “keperantaraan dan *enterpreuneur*” dalam tata kelola pemerintahan.
 - d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaanPemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2019 yang meliputi:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 5,6%;
- b. Inflasi sebesar 4 ± 1%;
- c. PDRB/Kapita sebesar Rp. 28,6 juta;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33 - 4,43%;
- e. Kemiskinan sebesar 11,01 - 12,01%.

Tabel 6
Isu Strategis dan Prioritas Daerah

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus
1	2	3
1	Kemiskinan	a. Penyediaan <i>basic life access</i> untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan melalui penanganan perumahan dan penyehatan lingkungan permukiman (RTLH, sanitasi, air

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus
1	2	3
		bersih, listrik); penanganan kawasan permukiman kumuh; penanganan kawasan permukiman kumuh; peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pangan, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi PMKS, dan kepemilikan administrasi kependudukan b. Penguatan <i>sustainable livelihood</i> melalui keberantaraan akses terhadap asset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan <i>start up</i> wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan. c. Penguatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta gotong royong pelibatan seluruh komponen potensi (swasta dan pihak lainnya) dalam kesetiakawanan sosial.
2	Kualitas dan Daya Saing SDM	a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan melalui sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus; pengembangan kurikulum berbasis <i>skill, knowledge, attitude</i> ; pengembangan <i>learning culture</i> ; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan pendidikan khusus dan inklusi sesuai kewenangan provinsi. b. Peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan; pengembangan SIM RS Rujukan <i>Online</i> ; peningkatan kualitas dan pemerataancakupan tenaga kesehatan; serta peningkatan capaian wilayah <i>Open Defecation Free</i> (tidak buang air besar sembarangan). c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan program pendidikan <i>link and match</i> berbasis <i>demand-driven</i> ; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi berstandar nasional dan/atau internasional); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung <i>demand</i> tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal. d. Pemanfaatan Bonus Demografi melalui peningkatan kualitas penduduk usia produktif (15-64 Tahun) yang didukung peran lintas sektor/program antara lain: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan investasi; e. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus
1	2	3
		dan anak, serta pembangunan keluarga melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak anak; serta peningkatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia f. Peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui penguatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. g. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat. h. Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan melalui peningkatan dan pengembangan generasi muda mandiri dan berdikari, pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan. i. Pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan serta kelembagaan olahraga melalui penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP), penyelenggaraan kuantitas dan kualitas kompetisi olahraga berkelanjutan, pengembangan olahraga unggulan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pembudayaan/pemassalan olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga. j. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui pengembanganseni budaya, pelestarian cagar budaya, dan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3	Kesenjangan wilayah	a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan mendukung pengembangan kawasan strategis dan pemerataan antara wilayah,serta menghubungkan pantura – pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun). b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya. c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp).
4	Daya saing ekonomi	a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian;

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus
1	2	3
		asuransi petani; peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; revitalisasi peran balai pertanian. b. Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing melalui peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; serta didukung dengan pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (<i>corporate farming</i>). c. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan; peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, kapal, TPI); perbaikan kualitas benih dan pakan ikan mandiri; peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolahan ikan untuk ekspor. d. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan rakyat); peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu. e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil, mikro, dan menengah melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk; hilirisasi industri; mengembangkan inovasi teknologi produksi; keberantaraan akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan kawasan industri; keberantaraan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri besar; fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM; serta peningkatan infrastruktur jaringan produksi, distribusi, promosi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia. f. Pengembangan inovasi teknologi dengan pengembangan <i>Technopark</i> serta peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat. g. Peningkatan pariwisata berbasis masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; peningkatan promosi wisata; kerjasama dengan pelaku wisata; aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; serta peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata. h. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, tepat; kebijakan investasi sejalan dengan prioritas daerah untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya saing wilayah; pengembangan <i>digital investment promotion</i>; pengembangan investasi berbasis produk-produk unggulan kabupaten/kota; serta mendorong perwujudan investasi hijau..
5	Kedaulatan pangan dan	a. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dengan

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus
1	2	3
	energi	mempertahankan luasan lahan pertanian; penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu dan keamanan pangan; Pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen. b. Pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; pengembangan listrik murah dan hemat; pengembangan energi baru terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya; serta budaya hemat energi.
6	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; perkuatan Lembaga Masyarakat Di sekitar Hutan (LMDH); pengelolaan sumber daya air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan, pengendalian perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau. b. Penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, memperkuat kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, penanganan tematik daerah rawan bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
7	Tata kelola pemerintahan	a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik; b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus
1	2	3
		c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya <i>clean and clear government</i> dan menerapkan “keperantaraan dan <i>enterpreuneur</i>” dalam tata kelola pemerintahan. d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 juga dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2019. Dalam rangka menyukseskan visi misi Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 – 2018, dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi bidang penanggulangan bencana, BPBD Prov Jawa Tengah berperan dan berkontribusi dalam melaksanakan misi ke 7, yaitu Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Korelasi dengan arah kebijakan pembangunan TA 2018 adalah sebagai berikut

Tabel 7
Sasaran dan Arah Kebijakan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan merata dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, dengan memperhatikan potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan	c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan berkelanjutan, serta pengelolaan bencana.	a. Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat; b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi).

Fokus prioritas pada arah kebijakan PB tersebut adalah

1. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana;

2. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan PB;
3. Pengembangan *Early Warning System* bencana berbasis masyarakat;
4. Pengembangan masyarakat tangguh bencana;

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar. Menurut UU 23 tahun 2014 termasuk dalam urusan ketentaraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan social. Tujuan, sasaran, dan indicator sasaraan BPBD Prov Jateng pada dokumen RKPD tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari target RPJMD yaitu **(Tujuan)** Meningkatkan Ketangguhan dalam PB dengan **Sasaran Strategis** yaitu Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam PB, dengan program Penyelenggaraan Penanggulangan bencana. Kegiatan priotirtas BPBD Prov Jateng adalah pembentukan desa tangguh bencana dan sekaligus dipadukan dengan konsep desa berdikari. Target capaian desa tangguh bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Target BPBD Pada RPJMD

No	Indikator Sasaran	Target RPJMD						Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa tangguh Bencana	25	27	29	30	60	68	46	44	52	60	68

Wilayah Jawa Tengah yang rawan dan berisiko terhadap bencana ditempati oleh masyarakat sebagai tempat tinggal. Permasalahan kepemilikan lahan dan tidak ada pilihan lokasi lain menjadi penyebab klasik sehingga sering terjadi korban yang cukup banyak ketika terjadi bencana. Upaya pendekatan kearifan lokal, melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana diharapkan masyarakat memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan serta memperkecil jumlah masyarakat yang terdampak bencana.

Tabel 9
Review Rancangan Awal SKPD 2019

	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			Catatan
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			
			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif 2019	Lokasi	Target	Pagu Indikatif 2019	
	TRABTIBUMLINMAS								
I	Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana				11.300.000.000			11.300.000.000	
1	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	8 kab/kota	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	20 desa	2.800.000.000	8 kab/kota	20 desa	2.800.000.000	
2	Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana	15 kabupaten/kota	persentase upaya PRB Jateng	13 Keg	3.000.000.000	15 kabupaten/kota	13 Keg	3.000.000.000	
3	Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg	10 kab/kota	Jumlah EWS dan rambu yang terpasang	375 Unit	2.500.000.000	10 kab/kota	375 Unit	2.500.000.000	
4	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana	35 Kab/Kota	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	5.000 Orang	3.000.000.000	35 Kab/Kota	5000 Orang	3.000.000.000	
	SOSIAL								
II	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				19.050.000.000			19.050.000.000	
1	Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi Pemangku kepentingan dan generasi muda	35 Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan/relawan muda yang dilatih	15.000 Orang	2.800.000.000	35 Kab/Kota	15000 Orang	2.800.000.000	
2	Pengembangan Pusdalops Jateng	35 Kab/Kota	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	100 %	1.500.000.000	35 Kab/Kota	100 %	1.500.000.000	

	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			Catatan
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			
			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif 2019	Lokasi	Target	Pagu Indikatif 2019	
3	Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana	35 kab/kota	jumlah sarana dan prasarana darurat yg tersedia/ disiapkan	7 Keg	2.850.000.000	35 kab/kota	7 Keg	2.850.000.000	
4	Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng	10 kabupaten /kota	jumlah masyarakat/ relawan yang terlatih	1000 Orang	1.500.000.000	10 kabupaten /kota	1000 Orang	1.500.000.000	
5	Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng	5 kab/kota terdampak	persentase masyarakat terdampak yang direhab	100 %	1.200.000.000	5 kab/kota terdampak	100 %	1.200.000.000	
6	Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	3 kabupaten /kota	Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	200 Orang	500.000.000	3 kabupaten /kota	200 Orang	500.000.000	
7	Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana jateng	35 lokasi	persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	100 %	1.000.000.000	35 lokasi	100 %	1.000.000.000	
8	Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	35 kab/kota	Jumlah penyediaan logistik (bulan)	12 Bulan	3.500.000.000	35 kab/kota	12 Bulan	3.500.000.000	
			persentase dapur umum yang dilaksanakan	100 %	500.000.000	35 kab/kota	100 %	500.000.000	
9	Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng	35 kab/kota	Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	10 Unit	3.000.000.000	35 kab/kota	10 Unit	3.000.000.000	
			persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	100 %	700.000.000	35 kab/kota	100 %	700.000.000	

	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			Catatan
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			
			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif 2019	Lokasi	Target	Pagu Indikatif 2019	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
	NON URUSAN (EKS BAU)								
II	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah				14.180.000.000			14.180.000.000	
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	12 Bulan	400.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	400.000.000	
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan PD	12 Bulan	600.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	600.000.000	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik PD	12 Bulan	450.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	450.000.000	
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	450.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	450.000.000	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	700.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	450.000.000	
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	2.000.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	700.000.000	

	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			Catatan
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			
			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif 2019	Lokasi	Target	Pagu Indikatif 2019	
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat PD	12 Bulan	400.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	400.000.000	
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan PD	12 Bulan	30.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	30.000.000	
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas /Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional PD	12 Bulan	2.200.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	2.200.000.000	
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga PD	12 Bulan	1.500.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	1.500.000.000	
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	BPBD Prov Jateng	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Jenis	1.500.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Jenis	1.500.000.000	
12	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	BPBD Prov Jateng	Jumlah Unit kendaraan Dinas Yang Diadakan	5 Unit	1.600.000.000	BPBD Prov Jateng	5 Unit	1.600.000.000	
13	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	BPBD Prov Jateng	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	60 Unit	50.000.000	BPBD Prov Jateng	60 Unit	50.000.000	

	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			Catatan
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			
			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif 2019	Lokasi	Target	Pagu Indikatif 2019	
14	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	BPBD Prov Jateng	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/Bintek/ Seminar	60 Orang	200.000.000	BPBD Prov Jateng	60 Orang	200.000.000	
15	Kegiatan Pelayanan Informasi PD	BPBD Prov Jateng	Jumlah laporan informasi public PD	4 Laporan	1.000.000.000	BPBD Prov Jateng	4 Laporan	1.000.000.000	
16	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan kepegawaian PD	12 Bulan	100.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	100.000.000	
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	BPBD Prov Jateng	Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Sekertariat DPRD	12 Bulan	1.000.000.000	BPBD Prov Jateng	12 Bulan	1.000.000.000	
III	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000.000			1.000.000.000	
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	600.000.000	BPBD Prov Jateng	4 Dokumen	600.000.000	
2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Prov Jateng	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	400.000.000	BPBD Prov Jateng	4 Laporan	400.000.000	
					46.880.000.000			46.880.000.000	

E. Penelahaan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa tengah dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Mekanisme perencanaan pembangunan telah dirancang agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan rencana pembangunan telah ditempuh melalui beberapa mekanisme usulan, yaitu kegiatan musrenbang, aspirasi langsung kepada gubernur saat kunjungan ke lapangan, aspirasi melalui hasil Reses DPRD, dll. Usulan terkait program dan kegiatan dari masyarakat hampir tidak ada selama proses tersebut.

Tabel 10
Kegiatan Usulan Masyarakat

No	Usulan	Lokasi	Volume	Catatan Hasil Pengataman
1				

Seiring dengan keterbukaan informasi public, dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka beberapa sarana untuk membangun sinergi dan komunikasi pembangunan dengan masyarakat. Kanal yang dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi jawa tengah antara lain melalui sms laporgub, website, media social (twitter, facebook, instagram, dll). Selain ditingkat pemerintah provinsi. Meskipun terhubung secara struktur, BPBD prov Jawa Tengah juga mempunyai kanal tersendiri melalui berbagai media yang dimanfaatkan untuk jalur komunikasi dua arah sehingga penanganan bencana di Jawa Tengah dapat berjalan dengan efektif, efisien, cepat, tanggap.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. maka visi BNPB 2015-2019 adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana. menjauhkan bencana dari masyarakat. meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi. mengadaptasi. memproteksi. serta menghindari/meminimalisir dampak bencana. serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu:

- 1) Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
- 2) Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat. efektif dan efisien;
- 3) Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
- 4) Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;

- Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

TUJUAN

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan. adalah:

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
- Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
- Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
- Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif. efisien. transpan dan akuntabel.

SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah **menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi**, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

- Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
- Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
- Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
- Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
- Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Tabel 11
Tujuan Dan Sasaran Program BNPB

No	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
1	2	3	4
1	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap	meningkatnya kapasitas ketangguhan	1) Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko

No	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
1	2	3	4
	pengurangan risiko bencana. yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat	daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	bencana; 2) Prosentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam PB; 3) Prosentase meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah
2	Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana	Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana	1) Rata-rata waktu respon kejadian bencana; 2) Prosentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masy korban bencana; 3) Prosentase jumlah korban yang selamat akibat bencana; 4) Jumlah personil PB yang terlatih dan kompeten
		Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana	1) Prosentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi; 2) Prosentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; 3) Prosentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; 4) Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana; 5) Prosentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana.
		Meningkatnya sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan	prosentase penyelenggaraan pembinaan penanganan darurat melalui sosialisasi peraturan/pedoman di daerah rawan bencana
3	Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	1) Prosentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memenuhi kriteria; 2) Prosentase pelaksanaan rehab rekons pasca bencana bidang fisik; 3) Prosentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pascabencana
4	Mewujudkan	Meningkatnya	prosentase daerah yang

No	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
1	2	3	4
	pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB	dukungan logistik dan peralatan PB yang memadai untuk kesiapsiagaan Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan PB	memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan Prosentase daerah yang menerapkan tata kelola logistik dan peralatan.
5	Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan. pelaksanaan anggaran. penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN). dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia	1) Prosentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu; 2) Prosentase jumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana; 3) Prosentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga; 4) Prosentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu; 5) Rata - rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kepegawaian; 6) Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.
6	Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif. efisien. transparan dan akuntabel	terwujudnya akuntabilitas dan good governance	1) Tingkat penerapan pengendalian internal; 2) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti; 3) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Sejalan dengan Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yaitu “Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari maka tujuan BPBD Prov Jawa Tengah adalah **Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana**, Sasaran yang akan dicapai BPBD Prov Jawa Tengah antara lain:

1. Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana

3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan, kinerja, dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana

Tabel 12
Sasaran dan Target Sasaran Program dan Kegiatan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penurunan resiko bencana	100
2	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Pesentase penanganan darurat kebencanaan	100
3	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase rehab rekon pasca bencana	100
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Persentase pemenuhan logistik bencana	100
5	Meningkatkan kapasitas pelayanan, kinerja, dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase layanan perkantoran	100

C. Program dan Kegiatan

Tahun 2019, alokasi APBD pada BPBD Prov Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 46.880.00.000 (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 Program dan 67 kegiatan. Ringkasan program kegiatan, target dan pagu anggaran disajikan pada table berikut.

Tabel 13
Program dan Kegiatan BPBD Jawa Tengah TA 2019

RANCANGAN AWAL				
No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Tolok Ukur	Target	Pagu
	TRABTIBUMLINMAS			
I	Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana			11.300.000.000
1	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	20 desa	2.800.000.000

RANCANGAN AWAL				
No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Tolok Ukur	Target	Pagu
2	Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana	persentase upaya PRB Jateng	13 Keg	3.000.000.000
3	Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg	Jumlah EWS dan rambu yang terpasang	375 Unit	2.500.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	5.000 Orang	3.000.000.000
	SOSIAL			
II	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			19.050.000.000
1	Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi Pemangku kepentingan dan generasi muda	Jumlah pemangku kepentingan/relawan muda yang dilatih	15.000 Orang	2.800.000.000
2	Pengembangan Pusdalops Jateng	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	100 %	1.500.000.000
3	Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana	jumlah sarana dan prasarana darurat yg tersedia/ disiapkan	7 Keg	2.850.000.000
4	Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng	jumlah masyarakat/ relawan yang terlatih	1000 Orang	1.500.000.000
5	Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng	persentase masyarakat terdampak yang direhab	100 %	1.200.000.000
6	Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	200 Orang	500.000.000
7	Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana Jateng	persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	100 %	1.000.000.000
8	Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Jumlah penyediaan logistik (bulan)	12 Bulan	3.500.000.000
		persentase dapur umum yang dilaksanakan	100 %	500.000.000
9	Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng	Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	10 Unit	3.000.000.000
		persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	100 %	700.000.000
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
	NON URUSAN (EKS BAU)			
II	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah			14.180.000.000

	RANCANGAN AWAL			
No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Tolok Ukur	Target	Pagu
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	12 Bulan	400.000.000
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan PD	12 Bulan	600.000.000
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik PD	12 Bulan	450.000.000
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	450.000.000
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	700.000.000
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	2.000.000.000
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat PD	12 Bulan	400.000.000
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan PD	12 Bulan	30.000.000
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas /Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional PD	12 Bulan	2.200.000.000
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga PD	12 Bulan	1.500.000.000
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Jenis	1.500.000.000
12	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Unit kendaraan Dinas Yang Diadakan	5 Unit	1.600.000.000
13	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	60 Unit	50.000.000
14	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/Bintek/Seminar	60 Orang	200.000.000
15	Kegiatan Pelayanan Informasi PD	Jumlah laporan informasi public PD	4 Laporan	1.000.000.000
16	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan kepegawaian PD	12 Bulan	100.000.000

	RANCANGAN AWAL			
No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Tolok Ukur	Target	Pagu
	perangkat daerah			
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Sekertariat DPRD	12 Bulan	1.000.000.000
III	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000.000.000
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	600.000.000
2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	400.000.000
				46.880.000.000

Rincian Program kegiatan terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) BPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 merupakan rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi, sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan. Sebagai sebuah dokumen rencana, setiap tahapan telah diusahakan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini. Namun jika terdapat situasi-situasi yang masih belum diperhitungkan atau berpengaruh pada perjalanan dokumen ini maka dokumen rencana ini dapat ditinjau kembali untuk perbaikan dan penyesuaian kondisi.

Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terkait kebijakan di tingkat nasional maupun provinsi yang berpengaruh terhadap strategi dan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Dokumen Renja BPBD Prov. Jawa Tengah tahun 2018 dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat terealisasi dan memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana.

Salam tangguh dan salam kemanusiaan.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019

PROVINSI JAWA TENGAH

SKPD : Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan Bidang	Prioritas Provinsi	Sasaran Daerah		Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab	Bidang	Catatan Penting	
									Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Uraian	Target		Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1				2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
01	06			SOSIAL														
01	06	19		Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana									30.350.000.000	31.800.000.000				
01	06	19	001	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	35 Kab/Kota;	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	20 Desa	Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	20 Desa	2.800.000.000	2.900.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Peningkatan dan penguatan kapasitas masyaarakat di daerah rawan bencana	
TOTAL Per Kegiatan													2.800.000.000	2.900.000.000				
01	06	19	002	Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	15 kabupaten/kota	persentase upaya PRB Jateng	100 %	jumlah masyarakat dan peamngku kepentingan terlatih	13 Keg	3.000.000.000	3.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	penyusunan peta risiko, identivikasi dan validai darah ran bencana m kajian risiko bencana, dialog interaktif, skolah aman bencana, kapasitas kluster, inklusif disabilitas, rakor komunitas, forum prb jatengpelinatan duniausaha	
TOTAL Per Kegiatan													3.000.000.000	3.000.000.000				
01	06	19	003	Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	10 kab/kota	Jumlah EWS dan rambu yang terpasang	375 Unit	meningkatnya upaya kesiapsiagaan masyarakat daerah rawan bencana	20 Lokasi	2.500.000.000	2.500.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	prngadaan 15 unit Ews dan 360 rambu	
TOTAL Per Kegiatan													2.500.000.000	2.500.000.000				
01	06	19	004	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/prabencana	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	35 Kab/Kota;	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	5000 Orang	meningkatnya upaya kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di Jateng	3 Keg	3.000.000.000	3.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah		uji rencana kesiapsiagaanan bencana masyarakat	
TOTAL Per Kegiatan													3.000.000.000	3.000.000.000				
01	06	19	005	Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-		Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih	10 Kelompok	meningkatnya upaya kesiapsiagaan dan ketramilan dalam penanganan darurat bencana masyarakat daerah rawan bencana	15000 Orang	2.800.000.000	3.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Penanganan Darurat	simulasi darurat bagi pelajar, mahasiswa, serasehan relawan	
TOTAL Per Kegiatan													2.800.000.000	3.000.000.000				

Kode				Urusan Bidang	Prioritas Provinsi	Sasaran Daerah		Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab	Bidang	Catatan Penting
									Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Uraian	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	06	19	006	Pengembangan Puskalops Jateng	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	35 kab/kota terdampak	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	100 %	terpantaunya kejadian dan asesment awal dampak bencana	10 Keg	1.500.000.000	1.800.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Penanganan Darurat	Latgab TRC, pelatihan ssistem komando darurat bencana, oelatihan manajemen klaster posko, manajemen pusdalops
TOTAL Per Kegiatan													1.500.000.000	1.800.000.000			
01	06	19	007	Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	Pendukung	100%	35 kab/kota	jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	7 Keg	meningkatnya upaya penanganan sektor terdampak saat darurat bencana	7 Keg	2.850.000.000	3.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Penanganan Darurat	droping air bersih,kaji cepat bencana banjir, tanah longsor,kekeringan , dan rakor kesiapan dan antisipasi menghadapi ancaman bencana
TOTAL Per Kegiatan													2.850.000.000	3.000.000.000			
01	06	19	008	Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	10 kabupaten/kota	jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	1000 Orang	meningkatnya upaya kesiapsiagaan dan ketrampilan dalam penanganan darurat bencana masyarakat daerah rawan bencana	2000 Orang	1.500.000.000	2.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Penanganan Darurat	bintek dan latihan gabungan
TOTAL Per Kegiatan													1.500.000.000	2.000.000.000			
01	06	19	009	Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	5 kabupaten/kota terdampak	persentase masyarakat terdampak yang direhab	100 %	meningkatnya upaya rehatiitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jateng	5 Keg	1.200.000.000	1.300.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	inevantarisasi kerusakan , kajian dampak bencana sektor ekonomi, bantuan stimulaish korban bencana,rakor teknis Pasca bencana
TOTAL Per Kegiatan													1.200.000.000	1.300.000.000			
01	06	19	010	Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	3 kabupaten/kota	Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	200 Orang	meningkatnya upaya rehatiitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jateng	3 Keg	500.000.000	500.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	peningkatan kapasaitas pemangku kepentingan PB dalam rehab rekon
TOTAL Per Kegiatan													500.000.000	500.000.000			
01	06	19	011	Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana jateng	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	35 lokasi terdampak	persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	100 %	meningkatnya upaya rehatiitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jateng	7 Keg	1.000.000.000	1.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
TOTAL Per Kegiatan													1.000.000.000	1.000.000.000			

Kode				Urusan Bidang	Prioritas Provinsi	Sasaran Daerah		Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab	Bidang	Catatan Penting
									Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Uraian	Target		Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	06	19	012	Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	35 kab/kota	Jumlah penyediaan logistik (bulan)	12 Jenis	meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana logistik bencana	12 Bulan	3.500.000.000	3.500.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Logistik dan Peralatan	pengadaan logistik, pendampingan pengelolaan logistik kab/kota, pelaithan klusster dapur umum, pelatihan kluster logistik, penyelenggaraan dapur umum
					Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	35 kab/kota	persentase dapur umum yang dilaksanakan	100 %	meningkatnya pngelolaan sektor logistk dan kebutuhan dasar masyaraakat terdampak bencana	6 Keg	500.000.000	500.000.000	Sekretariat Badan Penanggulungan Bencana Daerah	Bidang Logistik dan Peralatan	penyelenggaraan dapur umum, dapur umum, pendampingan pengelolaan logistik dan manajemen data logistik
TOTAL Per Kegiatan													4.000.000.000	4.000.000.000			
01	06	19	013	Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng	Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	35 kab/kota	Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	10 Unit	meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan penanggulangan bencana	12 Bulan	3.000.000.000	3.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulungan Bencana Daerah	Bidang Logistik dan Peralatan	penyediaan dan pengadaan peralatan dan pemeliharaan peralatan pb jateng
					Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup	-	-	35 kab kota	persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	100 %	meningkatnya pengelolaan sektor perlatan PB jateng	12 Bulan	700.000.000	800.000.000	Sekretariat Badan Penanggulungan Bencana Daerah	Bidang Logistik dan Peralatan	
TOTAL Per Kegiatan													3.700.000.000	3.800.000.000			
05				NON URUSAN													
05	01			NON URUSAN													
05	01	01		Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah									15.530.000.000	15.470.000.000			
05	01	01	001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan	Pendukung	100%	Jln Imam Bonjol NO 1 F Semarang	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	8 Jenis	tertib laporan dan administasi keuangan	8 Jenis	1.800.000.000	1.800.000.000	Sekretariat Badan Penanggulungan Bencana Daerah	Sekretariat	
TOTAL Per Kegiatan													1.800.000.000	1.800.000.000			
05	01	01	002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	-	-	-	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah	12 Bulan	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah	12 Bulan	400.000.000	400.000.000	Sekretariat Badan Penanggulungan Bencana Daerah	Sekretariat	penyediaan benda pos, atk, cetak penggandaan, dekorasi , dokumentai dan kearsipan kantpr BPBD Prov jateng
TOTAL Per Kegiatan													400.000.000	400.000.000			
05	01	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan	Pendukung	100%	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	12 Bulan	600.000.000	600.000.000	Sekretariat Badan Penanggulungan Bencana Daerah	Sekretariat	belanja jasa pembayaran berlangganan listrik, air dan telepon
TOTAL Per Kegiatan													600.000.000	600.000.000			
05	01	01	004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Tata kelola pemerintahan	Pendukung	100%	Jlan Imam Bonjol NO 1 F Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	terjaminnya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	450.000.000	450.000.000	Sekretariat Badan Penanggulungan Bencana Daerah	Sekretariat	asuransi aset barang milik daerah

Kode	Urusan Bidang	Prioritas Provinsi	Sasaran Daerah		Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab	Bidang	Catatan Penting			
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
			Uraian	Target		Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
TOTAL Per Kegiatan										450.000.000	450.000.000						
05	01	01	005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan	Pendukung	100%	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Terwujudnya pelaksanaan jasa pelayanan perkantoran, jasa kebersihan, keamanan kantor/umah dinas	12 Bulan	700.000.000	700.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa pelayanan perkantoran (honor pengelola keuangan), jasa tenaga teknis dan administratif /outsourcing
TOTAL Per Kegiatan										700.000.000	700.000.000						
05	01	01	006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Pendukung Prioritas	Pendukung	100%	BPBD Prov Jateng., 35 kab/kota, Kementerian / Lembaga terkait	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta kerjasama dalam rangka penyelenggaraan PB di Jateng	12 Bulan	2.000.000.000	2.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	Terselenggaranya berbagai kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta kerjasama dalam rangka penyelenggaraan PB di Jateng
TOTAL Per Kegiatan										2.000.000.000	2.000.000.000						
05	01	01	007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Pendukung Prioritas	Pendukung	100%	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	terwujudnya kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan di BPBD Jateng	12 Bulan	400.000.000	400.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	mendukung kelancaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di BPBD Jateng
TOTAL Per Kegiatan										400.000.000	400.000.000						
05	01	01	008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan	Pendukung	100%	BPBD Prov Jateng	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Meningkatnya pengetahuan dan bahan referensi bidang kebencanaan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	
TOTAL Per Kegiatan										30.000.000	30.000.000						
05	01	01	009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan	Pendukung	100%	Bpbd prov jateng	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Terpeliharanya aset gedung. Kendaraan dan sarana prasarana kantor bpbd prov jateng	12 Bulan	2.200.000.000	2.500.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	
TOTAL Per Kegiatan										2.200.000.000	2.500.000.000						
05	01	01	010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan	Pendukung	100%	Bpd prov jawa tengah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Terpeliharanya aset gedung. Kendaraan dan sarana prasarana kantor bpbd prov jateng	12 Bulan	1.500.000.000	1.600.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	
TOTAL Per Kegiatan										1.500.000.000	1.600.000.000						
05	01	01	011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pendukung Prioritas	Pendukung	100%	BPBD Prov Jateng	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 Jenis		12 Jenis	1.500.000.000	1.500.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	
TOTAL Per Kegiatan										1.500.000.000	1.500.000.000						
05	01	01	013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pendukung Prioritas	-	-	Bpbd prov jateng	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	5 Unit	Bertambahnya unit sarana kendaraan dinas operasional npbd prov jateng	5 Unit	1.600.000.000	1.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	
TOTAL Per Kegiatan										1.600.000.000	1.000.000.000						

Kode				Urusan Bidang	Prioritas Provinsi	Sasaran Daerah		Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2019	Prakiraan Maju Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab	Bidang	Catatan Penting	
						Uraian	Target		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1				2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
05	01	01	014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Pendukung Prioritas	Pendukung	100%	Bpbd prov jawa tengah	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	60 Unit		60 Unit	50.000.000	40.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat		
TOTAL Per Kegiatan													50.000.000	40.000.000				
05	01	01	015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendukung Prioritas	Pendukung	100%	Bpbd prov jateng	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	60 Orang	Meningkatnya kapasitas aparatur pb jateng	60 Orang	200.000.000	250.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat		
TOTAL Per Kegiatan													200.000.000	250.000.000				
05	01	01	016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	-	-	-		Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	4 Laporan		Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat		
TOTAL Per Kegiatan													1.000.000.000	1.000.000.000				
05	01	01	023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pendukung Prioritas	-	-	KOTA SEMARANG, SEMARANG UTARA, PLOMBOKAN;	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan kepegawaian BPBD	12 Bulan	100.000.000	200.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat		
TOTAL Per Kegiatan													100.000.000	200.000.000				
05	01	01	025	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Pengelolaan sumber daya alam/lingkungan hidup	-	-		Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opsional Sekertariat DPRD	12 Bulan	Meningkatnya kapasitas pelayanan, kinerja, dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana	12 Bulan	1.000.000.000	1.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat		
TOTAL Per Kegiatan													1.000.000.000	1.000.000.000				
05	01	02		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									1.000.000.000	1.200.000.000				
05	01	02	001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan	Pendukung	100%	Bpbd prov. Jateng	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	Meningkatnya kapasitas pelayanan, kinerja, dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana	4 Dokumen	600.000.000	650.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	dok perencanaan yang sesuai kaidah	
TOTAL Per Kegiatan													600.000.000	650.000.000				
05	01	02	002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendukung Prioritas	Pendukung	100%	Bpbd prov jateng	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan		4 Laporan	400.000.000	550.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat		
TOTAL Per Kegiatan													400.000.000	550.000.000				
TOTAL													46.880.000.000	48.470.000.000				